

Judul : Pasien BPJS berhak dapat perlakuan sama
Tanggal : Sabtu, 08 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bukan Warga Kelas Dua

Pasien BPJS Berhak Dapat Perlakuan Sama

SENAYAN menyayangkan komentar tak berempati dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan (nakes) terhadap pasien BPJS Kesehatan. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut etika profesi, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional.

Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, nakes merupakan profesi kemanusiaan sehingga ucapan maupun perilaku yang terkesan merendahkan penderitaan pasien tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. "Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati," tegas Nurhadi di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Sebelumnya, seorang pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Chae-rawan mencurahkan pengalamannya menunggu ruang perawatan hingga delapan jam di salah satu rumah sakit. Keluhan tersebut justru dibalas dengan cibiran negatif oleh sejumlah akun yang diidentifikasi sebagai nakes. Beberapa hari berselang, tepatnya pada 31 Juli 2026, Yurizal dikabarkan meninggal dunia, sehingga memicu kemarahan publik atas respons tidak beretika dari para nakes tersebut.

Nurhadi berharap, peristiwa tersebut menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Pelayanan kesehatan tidak hanya diukur dari kecanggihan alat dan kompetensi medis, tetapi juga dari sikap empati, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

La menilai, kasus tersebut perlu diusut secara objektif, termasuk dugaan pelanggaran etik oleh oknum nakes serta evaluasi terhadap sistem pelayanan rumah sakit. Apabila benar terjadi keterlambatan penanganan karena keterbatasan ruang rawat inap, publik berhak mengetahui penyebab sebenarnya. "Apakah yang terjadi murni persoalan kapasitas layanan, tata kelola rumah sakit, atau terdapat unsur kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan," tegas politisi Nasdem ini.

Nurhadi mengingatkan, peserta BPJS Kesehatan memiliki hak pelayanan yang sama dengan pasien lainnya karena telah dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "BPJS bukan pasien kelas dua. Tidak boleh ada stigma, diskriminasi, ataupun perlakuan berbeda hanya karena status pembiayaannya," tegas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.



Nurhadi

La meminta Kementerian Kesehatan (Kemkes), organisasi profesi, institusi pendidikan tenaga kesehatan, hingga seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memperkuat pembinaan etika profesi, termasuk etika bermedia sosial (medsos). Karena di era digital setiap pernyataan nakes di ruang publik dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis. "Profesionalisme tercermin tidak hanya di ruang praktik, tetapi juga dalam setiap interaksi di ruang digital," tandasnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Asep Rommy Romaya meminta para nakes berhati-hati dalam berkomentar di medsos

karena dampaknya bisa panjang. Apalagi, mereka sebagai abdi negara mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi.

Profesi nakes, tegas Asep, bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga panggilan kemanusiaan. Setiap dokter, perawat, maupun nakes mesti menjaga sikap, baik saat memberikan pelayanan secara langsung maupun ketika menyampaikan pendapat di ruang digital. "Medsos bukan ruang bebas tanpa batas. Apa yang disampaikan nakes akan dinilai masyarakat dan mencerminkan integritas profesinya," kata Asep di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Karena itu, kata Asep, mereka mesti bijak menggunakan medsos, menjaga tutur kata, serta menghindari komentar yang merendahkan atau menyakiti pasien maupun keluarganya. Terlebih, setiap nakes telah mengucapkan sumpah atau janji profesi yang menempatkan keselamatan pasien, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap martabat setiap orang sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.

Nilai-nilai tersebut, kata dia, tidak boleh berhenti ketika nakes meninggalkan tempat praktik, tetapi juga mesti tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk di

medsos. Jangan sampai hilang rasa empati. Karena masyarakat menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada nakes. Kepercayaan itu mesti dijaga dengan sikap yang mencerminkan kepedulian, penghormatan terhadap martabat pasien, dan profesionalisme.

"Sumpah atau janji profesi bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen moral yang dipegang teguh sepanjang hayat," tandas politisi PKB ini.

Asep menambahkan, pelayanan kesehatan mesti diberikan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Perbedaan status kepesertaan BPJS, kelas perawatan, maupun kemampuan ekonomi tidak boleh memengaruhi kualitas pelayanan maupun cara nakes memperlakukan pasien.

Dengan itu, apabila nakes terbukti memberikan komentar yang melanggar etika profesi perlu mendapatkan pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar menjadi pembelajaran bersama dan kejadian serupa tidak terulang.

"Marwah profesi mesti dijaga. Karena, profesi ini dibangun di atas kepercayaan, empati, dan pengabdian kepada sesama manusia," pungkasnya. ■ TIF